

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan buruh atau pekerja adalah setiap individu yang melakukan pekerjaan dan mendapatkan upah atau imbalan dalam bentuk lain . Definisi buruh mengacu pada pekerja, yaitu mereka bekerja dengan tenaga kerja manual dan mendapatkan suatu imbalan dalam bentuk upah . Definisi ini ditujukan kepada pekerja yang mengandalkan kekuatan fisik tanpa keterampilan, begitu juga bagi perempuan, walaupun tidak menggunakan kekuatan fisik, tetapi menggunakan ketekunan, kesabaran dan ketelitian dalam melakukan pekerjaannya.

Sektor industri memegang peranan utama yang akan mendorong perkembangan sektor lain, seperti sektor pertanian dan industri jasa, sehingga nantinya akan mengarah pada perluasan lapangan kerja dan sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat. Urutan kategori ekonomi di Kabupaten Lamongan Tahun 2019 yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Lamongan tahun 2019 adalah kategori Jasa 46,80 %, kategori Pertanian 32,20 %, dan kategori Industri 21,00 % (BPS, 2019). Menurut Dewi & Suseno (2020), pendorong manusia untuk melakukan sebuah pekerjaan adalah karena adanya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Kegiatan dalam bekerja mengandung unsur kegiatan sosial, menghasilkan sesuatu, dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi di balik tujuan tidak langsung ini, orang-orang berusaha keras untuk mendapatkan bayaran, upah atau gaji dari pekerjaan mereka.

Dengan adanya pertumbuhan sektor industri tersebut banyak masyarakat di Desa Srirande memilih bekerja menjadi buruh pabrik. Tercatat sebanyak 295 jiwa masyarakat yang bekerja sebagai buruh pabrik, yang menduduki urutan pertama jenis pekerjaan terbanyak masyarakat di Desa Srirande (Buku Profil Desa Srirande, 2020). Salah satu perusahaan yang menjadi pilihan bekerja mereka adalah PT. Bumi Menara Internusa. Perusahaan ini bergerak di bidang perikanan yang mengelola udang beku. Para buruh atau pekerja pabrik yang ada di desa Srirande hanya dipekerjakan sebagai pekerja kontrak oleh pabrik atau industri tempatnya bekerja. Namun, sebagian besar (90%) pekerja berasal dari desa Srinande. Pekerja kontrak adalah orang perseorangan yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tetap (PKWT) dan memiliki hubungan kerja dengan pemberi kerja. Secara umum pekerja kontrak bekerja untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan suatu bentuk perjanjian kerja, waktu kerja maksimal 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun (Alamsari, 2017).

Menurut Hanum (2018), pendidikan adalah faktor utama dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas baik untuk pembangunan. Masyarakat pedesaan membutuhkan sumber daya yang berkualitas tinggi untuk memperoleh pembangunan. Selain itu, diperlukan inovasi agar tenaga kerja yang surplus di sektor pertanian tidak sampai mencari pekerjaan di kota. Namun nyatanya, masih banyak warga desa yang belum menamatkan pendidikan yang lebih tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula pengeluaran konsumsinya sehingga mempengaruhi pola konsumsi dan hubungan yang positif. Ketika seseorang atau suatu keluarga memiliki pendidikan yang lebih tinggi, maka kebutuhan hidupnya akan meningkat. Alasannya, mereka tidak hanya harus memenuhi kebutuhan makanan dan

minuman, tetapi juga kebutuhan akan informasi, komunikasi dalam masyarakat, dan pengakuan terhadap orang lain (Hanum, 2018). Tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Lamongan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Lamongan Tahun 2019

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
SD kebawah	133 842	105 690	239 532
Sekolah Menengah Pertama	80 992	56 541	137 533
Sekolah Menengah Atas	69 179	51 895	121 074
Sekolah Menengah Kejuruan	35 686	10 357	46 043
Diploma+Universitas	38 045	37 192	75 237
Jumlah	357 744	261 675	619 419

Sumber: BPS, 2019 (Diolah)

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa tingkat pendidikan tertinggi yang telah diselesaikan oleh penduduk dengan usia 15 tahun ke atas yang telah bekerja masih didominasi oleh tamatan pendidikan SD kebawah diikuti oleh tamatan SMP, SMA, SMK, dan Diploma/Universitas. Tingginya biaya pendidikan menjadi kendala bagi masyarakat khususnya di pedesaan, sehingga pengeluaran pendidikan keluarga juga semakin meningkat (Sanjaya & Dewi, 2017). Sementara itu, rata-rata lama pendidikan memiliki hubungan timbal balik yang positif dan signifikan terhadap angkatan kerja, hal ini disebabkan karena pendidikan yang lebih tinggi memudahkan buruh untuk memperoleh pekerjaan dan sumber daya dilihat dari kualitas dari pendidikan yang tinggi (Firda & Amar, 2018).

Menurut Hanum (2018), ada batasan konsumsi minimal yang tidak bergantung pada tingkat pendapatan. Dalam hal pendapatan mempunyai pengaruh yang besar terhadap konsumsi. Selain variabel pendapatan, pola konsumsi juga disebabkan oleh *Human Capital* (seperti pendidikan). Semakin

tinggi jenjang pendidikan seseorang, semakin baik kualitas sumber daya yang berpengaruh pada upah. Upah dapat diartikan sebagai imbalan yang dibayarkan oleh pengusaha atas jasa tenaga yang diberikan oleh buruh atau tenaga kerja, dan ditentukan sebagai jumlah total jasa yang diberikan oleh pekerja dalam periode atau kondisi tertentu. Asumsi yang menjadi dasar teori *Human Capital* adalah bahwa individu dapat menambah pendapatannya jika diiringi dengan meningkatkan pendidikannya. Setiap tahun tambahan pendidikan berarti di satu sisi meningkatkan skil kerja dan tingkat pendapatan seseorang, tetapi di sisi lain hal itu menunda perolehan pendapatan selama satu tahun, dan berharap untuk meningkatkan pendapatan seiring dengan peningkatan tingkat pendidikan. Selain pendapatan rata-rata yang lebih rendah, pekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah juga mengalamii situasi yang lebih sulit karena pendapatan mereka meningkat relatif lebih lambat (stagnan) apabila dibandingkan pekerja dengan pendidikan tinggi (ILO, 2017).

Tabel 1.2 Besaran Upah Minimum Kabupaten atau Kota tahun 2020 di Jawa Timur

No	Kabupaten/kota	UMK
1	Kota Surabaya	Rp. 4.200.479,19
2	Kab. Gresik	Rp. 4.197.030,51
3	Kab. Sidoarjo	Rp. 4.193.581,85
4	Kab. Pasuruan	Rp. 4.190.133,19
5	Kab. Mojokerto	Rp. 4.179.787,17
6	Kab. Malang	Rp. 3.018.530,66.
7	Kota Malang	Rp. 2.895.502,74.
8	Kota Batu	Rp. 2.794.800,00.
9	Kota Pasuruan	Rp. 2.794.801,59
10	Kab. Jombang	Rp. 2.654.095,87.
...		
14	Kab.Lamongan	Rp. 2.423.724,77

Sumber: Bappeda Jatim, 2019 (Diolah)

Berdasarkan tabel diatas besaran UMK Kabupaten Lamongan Tahun 2020 sebesar Rp. 2.423.724,77, besaran UMK tersebut Kabupaten Lamongan bahkan

tidak termasuk kedalam 10 Kabupaten atau Kota dengan UMK tertinggi di Jawa Timur Tahun 2020. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah minimum merupakan batas minimum bagi pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerjanya. Dan karena setiap provinsi memiliki persyaratan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan normal, maka hal itu disebut upah minimum provinsi. Mengenai dampak upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja, menurut Simanjuntak (2017), apabila tingkat upah yang lebih tinggi akan dapat menaikkan biaya produksi, sehingga untuk meningkatkan efisiensi perusahaan maka harus dilakukan pengurangan tenaga kerja sehingga akan menurunkan kesempatan kerja. Sementara itu salah satu dampak dari kenaikan upah ini adalah mendorong pengusaha untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja dan terus menurunkan produksi.

Dari besaran UMK tersebut para buruh pabrik di Kabupaten Lamongan menerima upah atau pendapatan sesuai dengan besaran UMK yang ditetapkan. Tetapi menariknya walaupun buruh pabrik di Desa Srirande telah mendapatkan upah sesuai UMK Kabupaten Lamongan yang telah ditetapkan mereka masih mencari atau melakukan pekerjaan sampingan untuk dapat menambah pendapatan yang diterima. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 17 Tahun 2005, UMK ditetapkan melalui berbagai komponen pertimbangan seperti Kebutuhan Layak Hidup (KHL). Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga termasuk komponen pertimbangan untuk menentukan UMK. Dari uraian tersebut secara normal UMK yang diterima oleh buruh pabrik di Desa Srirande dapat memenuhi kebutuhan hidup untuk membeli barang-barang kebutuhannya. Namun, sesuai dengan penelitian pendahuluan

yang dilakukan oleh peneliti masih ditemukan bahwa mereka masih memiliki pekerjaan sampingan. Hal ini membawa keyakinan peneliti bahwa UMK yang mereka dapatkan dari bekerja sebagai buruh pabrik belum mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan keluarganya.

Era yang terus berkembang juga telah mendorong kebutuhan umat manusia yang terus berubah. Kebutuhan manusia bukan lagi hanya kebutuhan sandang, papan dan pangan, tetapi kebutuhan kesehatan, gaya hidup, komunikasi, dll. Kegiatan pengeluaran untuk barang dan jasa rumah tangga disebut dengan konsumsi rumah tangga. Barang adalah aktivitas belanja keluarga yang digunakan untuk produk seperti makanan, mobil, pakaian, dan produk lainnya. Sedangkan jasa adalah kegiatan pengeluaran rumah tangga yang digunakan untuk hal-hal yang tidak terlihat, seperti kesehatan, perbengkelan, pendidikan, asuransi, dll (Syukri & Rahmatia, 2020). Diulio (2018) meyakini bahwa konsumsi mencakup dua jenis, yaitu konsumsi sementara dan konsumsi bersifat rutin. Konsumsi harian atau rutin mengacu pada pengeluaran untuk barang dan jasa secara terus menerus, sedangkan konsumsi sementara merupakan pengeluaran untuk barang dan jasa diluar konsumsi sehari-hari. Di sisi lain konsumsi adalah bagian dari pendapatan yang dibelanjakan untuk pembelian barang dan jasa guna memenuhi dan memuaskan kebutuhan. Kenaikan pengeluaran konsumsi rumah tangga selalu lebih kecil dari peningkatan pendapatan. Besarnya kenaikan pengeluaran konsumsi tergantung pada keinginan masyarakat terhadap berbagai konsumsi yang disebut dengan kecenderungan konsumsi atau *Propensity to Consume*.

Pola konsumsi merupakan susunan tingkat kebutuhan pribadi atau keluarga yang terpenuhi dari pendapatan dalam kurun waktu tertentu, dalam

merealisasikan pola konsumsi ini, masyarakat biasanya mengutamakan kebutuhan dasar. Jika pendapatan menurun maka realisasi kebutuhan sekunder akan terhambat (Sakti, 2018). Pola konsumsi mengacu pada kebutuhan manusia yang berupa barang dan jasa, dan tidak hanya dialokasikan untuk kepentingan pribadi, tetapi dialokasikan kepada keluarga berdasarkan hubungan dan tanggung jawab yang terwujud sebagai kebutuhan primer, sekunder dan tersier (Reta, 2018).

Kebutuhan dasar merupakan konsumsi terpenting yang harus dipenuhi agar dapat melanjutkan kehidupan manusia dengan baik. Misalnya, kebutuhan dasar ini merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh orang miskin dan orang kaya, termasuk kebutuhan pangan, pakaian, sandang dan papan untuk bertahan hidup. Konsumsi yang dilakukan saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposable dalam waktu sekarang. Jika pendapatan disposable mengalami peningkatan, maka konsumsi juga akan mengalami peningkatan. Ada suatu batas konsumsi minimal yang tidak bergantung pada besarnya pendapatan. Artinya tingkat konsumsi itu harus dipenuhi, walaupun besaran pendapatan sama dengan nol. Itulah yang disebut dengan konsumsi *otonomus*. Konsumsi merupakan bentuk penggunaan barang dan jasa yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan manusia atau perilaku yang ada di masyarakat dalam membelanjakan dan menghabiskan sebagian pendapatannya untuk membeli barang dan jasa.

Pendapatan disposable adalah pendapatan yang telah dikurangi oleh pajak atau dengan kata lain pendapatan yang siap digunakan untuk konsumsi. Pendapatan disposable merupakan faktor penting dalam membentuk konsumsi seseorang ataupun dalam suatu negara (Anghel, 2018). Pengeluaran konsumsi masyarakat Kabupaten Lamongan Tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3 Rata-Rata Pengeluaran (Rupiah) Per Kapita Sebulan Masyarakat Kabupaten Lamongan Menurut Kelompok Barang dan Kuintil Pengeluaran 2017

Kelompok Barang	Kuintil Pengeluaran				
	Kuintil 1	Kuintil 2	Kuintil 3	Kuintil 4	Kuintil 5
Padi-padian	43.69	48.47	50.80	57.61	61.67
Umbi-umbian	1.10	2.39	3.06	4.84	6.04
Ikan/udang/ cumi/kerang	29.59	39.14	41.84	48.30	66.38
Daging	17.29	21.61	25.95	35.55	47.95
Telur dan susu	19.40	25.83	28.34	43.22	68.02
Sayur-sayuran	20.92	30.81	40.40	46.68	56.39
Kacang-kacangan	8.94	11.69	17.10	22.53	21.86
Buah-buahan	11.80	17.72	23.34	35.13	55.93
Minyak dan kelapa	9.12	10.79	12.64	14.16	17.82
Bahan minuman	9.92	13.23	14.05	16.25	20.92
Bumbu-bumbuan	5.47	7.27	8.05	9.02	11.23
Konsumsi lainnya	7.22	8.92	11.27	12.13	15.55
Makanan dan minuman jadi	105.03	172.50	229.30	300.95	420.17
Rokok dan tembakau	34.06	62.01	88.99	104.19	98.72
Jumlah Makanan	323.56	472.36	595.12	750.56	968.65
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	114.03	173.30	220.75	300.71	583.54
Aneka barang dan jasa	53.53	88.64	128.47	142.16	332.14
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	13.03	20.84	28.54	32.92	57.04
Barang tahan lama	4.74	15.68	34.60	46.69	225.04
Pajak, pungutan, dan asuransi	10.67	19.77	22.38	35.82	88.04
Keperluan pesta dan upacara/kenduri	474.00	5.60	4.72	6.13	100.64
Jumlah Bukan Makanan	196.47	323.83	439.46	564.42	1.386.436
Jumlah	520.03	796.18	1.034.577	1.314.977	2.355.081

Sumber: BPS, 2017 (Diolah)

Dari data diatas dapat dikatakan bahwa mayoritas pengeluaran per kapita dalam sebulan masyarakat Kabupaten Lamongan dalam kuintil 1 sampai dengan kuintil 5 pengeluaran masih didominasi oleh pengeluaran yang berupa bahan makanan. Hal ini dikarenakan pola konsumsi masyarakat dengan ekonomi

menengah kebawah biasanya didominasi oleh konsumsi kebutuhan-kebutuhan pokok/dasar seperti makanan (Wei *et al*, 2020). Menurut jenis barang dan jasa, pengeluaran konsumsi masyarakat dapat dibedakan menjadi beberapa kategori. Klasifikasi kategori ini untuk menghitung anggaran tiap rumah tangga. Konsumsi rumah tangga mencakup semua barang atau jasa yang diperoleh dalam produksi atau konsumsi sendiri (Ahmed & Mughal, 2018). Semakin tinggi pendapatan maka pola konsumsi tersebut seringkali mengarah pada konsumsi non pangan, sebaliknya semakin rendah pendapatan maka pola konsumsi tersebut seringkali mengarah pada konsumsi pangan. Oleh karena itu, faktor pendapatan berpengaruh terhadap tren pola konsumsi (Ali *et al*, 2020).

Menurut Nsabimana *et al* (2020), pola konsumsi dan pengeluaran rumah tangga biasanya bervariasi antar ekosistem, kelompok pendapatan, suku, dan seiring berjalannya waktu. Pola konsumsi dan struktur pengeluaran merupakan indikator tingkat kesejahteraan rumah tangga. Dalam hal ini, dibandingkan dengan rumah tangga dengan proporsi pengeluaran pangan yang lebih tinggi, maka rumah tangga dengan proporsi pengeluaran pangan tertinggi diklasifikasikan sebagai rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang rendah apabila dibandingkan dengan rumah tangga dengan proporsi pengeluaran non pangan yang lebih tinggi. Zhang (2017) mengemukakan bahwa semakin tinggi tingkat kesejahteraan penduduk di suatu negara, semakin kecil proporsi pengeluaran pangan, begitu pula sebaliknya pengeluaran pangan rumah tangga akan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan pendapatan, namun banyaknya pengeluaran pangan dalam total pendapatan akan menurun, fenomena ini disebut Hukum Engel.

Pergeseran struktur pengeluaran konsumsi pangan menjadi non pangan disebabkan karena permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sehingga jumlah pengeluaran konsumsi pangan yang semakin kecil menjadikan indikator bahwa tingkat kesejahteraan yang semakin membaik. Keluarga yang berpenghasilan rendah akan lebih mementingkan konsumsi pangan daripada non pangan (Mayasari *et al*, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa pergeseran kebutuhan konsumsi dimungkinkan telah terjadi dalam keluarga yang berpendapatan rendah. Artinya, meskipun keluarga ini memiliki pendapatan yang rendah tetapi akan mementingkan konsumsi non pangan juga walaupun proporsinya memiliki selisih yang sedikit dari kesediaan mereka dalam konsumsi pangan.

Konsumsi rumah tangga dipengaruhi juga oleh banyaknya anggota keluarga yang akan meningkatkan pengeluaran konsumsi (Sanjaya & Dewi, 2017). Dalam penelitian ini, dia menjelaskan hubungan sosial yang berhubungan positif dengan konsumsi rumah tangga. Tanggungan adalah orang yang masih terhubung dengan keluarga atau masih dianggap sebagai keluarga, termasuk juga kehidupannya. Anggota keluarga merupakan salah satu faktor utama anggota keluarga ikut serta membantu kepala rumah tangga memutuskan bekerja untuk mencari nafkah. Anggota keluarga yang dimasukkan adalah banyaknya seluruh anggota keluarga yang tinggal dan makan di satu meja yang sama dengan kelompok penduduk yang termasuk dalam kelompok pekerja. Mereka yang makan di satu meja yang sama dan mengelola kebutuhan sehari-hari bersama. Oleh karena itu, anggota keluarga yang termasuk adalah mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri karena kurangnya pekerjaan (pada usia tidak produktif) sehingga membutuhkan bantuan, dalam hal ini adalah orang tua (Hanum, 2018).

Penelitian ini memposisikan pola konsumsi sebagai bentuk dari adanya faktor pendapatan yang diterima, pengeluaran yang terjadi, dan tabungan yang dimiliki. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana suatu keluarga yang kepala keluarganya bekerja sebagai buruh pabrik dalam melakukan konsumsi baik berupa barang ataupun jasa dengan dengan karakteristik ekonomi yang dimiliki sehingga akan tercipta tingkat kesejahteraan dalam keluarga.

Dari beberapa kondisi yang ada maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pola konsumsi keluarga buruh pabrik dimana terlebih dahulu untuk mengetahui karakteristik dalam aspek ekonomi keluarga dari sisi pendapatan, pengeluaran dan tabungan. Karena bagaimanapun juga suatu keluarga buruh pabrik termasuk golongan masyarakat dengan perekonomian keluarga menengah kebawah, sehingga kesejahteraan semua anggota keluarga merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu keluarganya. Penelitian ini dapat dirumuskan dalam studi tentang **“Pola Konsumsi Keluarga Buruh Pabrik (Studi Pada Keluarga Buruh Pabrik PT. Bumi Menara Internusa Lamongan Yang Ada di Desa Srirande Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik ekonomi keluarga buruh pabrik PT. Bumi Menara Internusa Lamongan di Desa Srirande Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan?

2. Bagaimana pola konsumsi keluarga buruh pabrik PT. Bumi Menara Internusa Lamongan di desa Srirande Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik ekonomi keluarga buruh pabrik PT. Bumi Menara Internusa Lamongan di Desa Srirande Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pola konsumsi keluarga buruh pabrik PT. Bumi Menara Internusa Lamongan di desa Srirande Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat terhadap perkembangan teori konsumsi khususnya tentang pola perilaku konsumsi rumah tangga keluarga yang bekerja sebagai buruh pabrik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada masyarakat khususnya para keluarga buruh pabrik tentang pola konsumsi dalam keluarga serta dapat dijadikan bahan rekomendasi penetapan kebijakan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam hal konsumsi masyarakat.